



LAPORAN AKTUALISASI

PEMBAHARUAN TAMPILAN WEB DASHBOARD PEMBANGUNAN UNTUK AKUNTABILITAS INFORMASI PUBLIK DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**DISUSUN OLEH
ABDURRAHMAN AZZAM
NIP. 200110232024091002**

**COACH
Dr. ELSANRA EKA PUTRA, S.Pd, M.Si
NIP. 19760513 201101 1 002**

**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III ANGKATAN XXXV
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NAMA : **ABDURRAHMAN AZZAM, S.Tr.IP**
NIP : **200110232024091002**
NDH : **1**
JABATAN : **FASILITATOR PEMERINTAHAN**
INSTANSI : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

JUDUL LAPORAN AKTUALISASI

**“PEMBAHARUAN TAMPILAN WEB DASHBOARD PEMBANGUNAN
UNTUK AKUNTABILITAS INFORMASI PUBLIK DI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT”**

Disetujui untuk disampaikan pada **Evaluasi Laporan Aktualisasi** Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan XXXV dilaksanakan pada
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Agustus 2025

Diajukan Oleh,

Abdurrahman Azzam, S.Tr.IP

NIP. 200110232024091002

Menyetujui,

Coach

Mentor

Dr. Elsanra Eka Putra, S.Pd, M.si

NIP. 19760513 201101 1 002

Teddy Rafdianto, S.Kom,M.Kom

NIP. 197906032010011006

BERITA ACARA

SEMINAR LAPORAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XXXV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada hari Jumat tanggal delapan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh lima jam 08.00 wib bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah diseminarkan Laporan Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XXXV Tahun 2025.

**JUDUL : PEMBAHARUAN TAMPILAN WEB DASHBOARD
PEMBANGUNAN UNTUK AKUNTABI- LITAS INFORMASI
PUBLIK DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DISUSUN OLEH : ABDURRAHMAN AZZAM, S.Tr.IP

NIP : 200110232024091002

NDH : 1

JABATAN : FASILITATOR PEMERINTAHAN

**INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

**Disetujui,
Coach**

**Diajukan oleh,
Peserta**

Dr. Elsanra Eka Putra, S.Pd, M.Si
NIP. 19760513 201101 1 002

Abdurrahman Azzam, S.Tr.IP
NIP. 20020420 202409 1 001

Diketahui,

Penguji

Mentor

Trisna Sri Mulyani, S.STP
NIP. 19860516 200412 2 001

Teddy Rafdianto, S.Kom,M.Kom
NIP. 197906032010011006

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya bagi-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, teladan utama dan penutup para nabi. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata, dan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dokumen Laporan Aktualisasi ini disusun sebagai salah satu instrumen penting guna memenuhi kriteria kelulusan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XXXV yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Untuk merealisasikan capaian tersebut, penulis mengajukan Laporan aktualisasi ini dengan fokus pada "**PEMBAHARUAN TAMPILAN WEB DASHBOARD PEMBANGUNAN UNTUK AKUNTABILITAS INFORMASI PUBLIK DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT**", sebagai kontribusi dalam merampungkan program Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Dalam penulisan laporan laporan aktualisasi ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari semua pihak yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, doa dan motivasi kepada penulis. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

- 1) Kedua Orang tua Penulis beserta kedua adik saya yang selalu support dalam hal moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
- 2) Ibu Ir. Desniarti, MM selaku kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Bapak Medi Iswandi, ST, MM sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Bapak Dr. Elsanra Eka Putra, S.Pd, M.Si selaku coach yang membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan Aktualisasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat;
- 5) Ibu Winny Sayori, ST, M.MP dan Ibu Verawati Darman, SE sebagai pembimbing dan mentor yang membimbing penulis dalam menyelesaikan

Laporan aktualisasi selama proses masa habituasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- 6) Segenap Civitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan pembelajaran sekaligus pelatihan kepada penulis selama melaksanakan proses Pelatihan Dasar CPNS di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat;
- 7) Segenap Aparatur Sipil Negara terkhusus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu penulis dalam proses masa habituasi dan pengumpulan data di lapangan;
- 8) Semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan aktualisasi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 9) Penulis menyadari dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, laporan aktualisasi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis mohon maaf serta mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan laporan ini di masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga laporan LAPORAN aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Padang, 8 Agustus 2025

Penulis,

Abdurrahman Azzam, S.Tr.IP

NIP. 200110232024091002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LAPORAN AKTUALISASI	i
BERITA ACARA	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Isu	3
C. Perumusan dan Penetapan Isu	4
D. Rencana kegiatan, tahapan kegiatan dan output yang diharapkan	6
1. Rencana Kegiatan dan Output.....	6
2. Matriks Rancangan Aktualisasi	6
BAB II	14
DESKRIPSI LOKUS	14
A. DESKRIPSI UMUM	14
1. Gambaran Umum Instansi	14
2. Sumber Daya	15
3. Visi dan Misi	17
4. Tugas Pokok dan Fungsi	18
5. Struktur Organisasi	18
B. Deskripsi Khusus	19
1. Program dan Kegiatan Saat Ini	19
2. Role Model	19
BAB III	21
REALISASI AKTUALISASI	21
A. Realisasi dan Kegiatan Output	21
B. Faktor Pendukung Realisasi Aktualisasi	30
C. Faktor Penghambat Realisasi Aktualisasi	30
D. Analisa Dampak	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1: Data USG (Urgency, Seriousness, Growth)	8
Tabel 1. 2: Data APKL (Aktual, Problematik, Kelayakan, Layak) dan Keterangan Prioritas	8
Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Bappeda Prov. Sumbar	2
Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Bappeda Prov. Sumbar Berdasarkan Jenis Kelamin	3
Tabel 2. 3 Komposisi PNS Bappeda Prov. Sumbar Berdasarkan Golongan Kepangkatan	3
Tabel 3. 1 Rencana Kegiatan, Tahapan Kegiatan Dan Output Yang Diharapkan	1
Tabel 3. 2Jadwal Rencana Aktualisasi Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bappeda Sumatera Barat.....	14
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi.....	18
Gambar 2. 3 Role Model Penulis	19
Gambar 3. 1 Konsultasi dengan Mentor	22
Gambar 3. 2 Meminta saran dan masukan kepada rekan kerja.....	22
Gambar 3. 3 Diskusi atas gagasan terhadap isu yang terpilih	23
Gambar 3. 4 Materi tentang Web Dashboard Pembangunan.....	24
Gambar 3. 5 Konsultasi dengan pegawai di bidang P2EPD	24
Gambar 3. 6 Mengumpulkan materi yang sudah didapatkan	24
Gambar 3. 7 Konsultasi dengan Kepala bidang P2EPD.....	25
Gambar 3. 8 Pembuatan Pembaharuan Web Dashboard Pembangunan	26
Gambar 3. 9 Mencatat Informasi penting saat konsultasi.....	26
Gambar 3. 11 Melaksanakan pembaharuan	27
Gambar 3. 12 Penyelesaian pembaharuan	28
Gambar 3. 13 Diskusi dan arahan	29
Gambar 3. 14 Hasil Proses Pembaharuan	29
Gambar 3. 15 Penyelesaian Laporan Aktualisasi	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pada saat melaksanakan tugasnya, ASN memiliki aturan atau rambu-rambu yang harus dipatuhinya saat bertugas, hal itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN pasal ayat 5 bahwa manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan itu, diadakanlah pelatihan dasar (LATSAR) untuk calon pegawai negeri sipil yang diatur oleh Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (PERLAN) Nomor 10 Tahun 2021.

Pelatihan dasar yang diberikan kepada peserta calon PNS berupa menanamkan nilai-nilai bela negara berupa wawasan kebangsaan, pembahasan isu kontemporer dan penerapan nilai-nilai dasar ASN dengan materi ASN yang BerAKHLAK yaitu Berorientasi Layanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Penerapan nilai-nilai dasar ASN diatur dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN. Setelah melaksanakan Pelatihan ini ASN diharapkan dapat menerapkan Core Value ASN dengan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan tersebut. Untuk terwujudnya Smart Governance peserta dibekali pengetahuan peran dan kedudukan PNS berupa Smart ASN dan Manajemen ASN. Manajemen ASN ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 yang mengatur tentang tata kelola ASN agar memahami tugas dan fungsinya sebagai ASN.

Keterbukaan informasi publik merupakan isu global yang semakin penting di era digital ini. Masyarakat di seluruh dunia menuntut akses yang lebih besar terhadap informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga publik lainnya. Hal ini untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. salah satu isu global dalam keterbukaan informasi publik adalah Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Informasi Publik. Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Informasi Publik merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan informasi yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga publik kepada masyarakat akurat, lengkap, terbaru, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun beberapa hal yang menjadi pengaruh dalam peningkatan kualitas dan akuntabilitas informasi publik adalah:

1. Akurasi dan kelengkapan yaitu memastikan informasi publik yang diberikan akurat, lengkap, dan terbaru untuk menjamin kualitas informasi yang diterima masyarakat.

2. Monitoring dan evaluasi dengan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan kualitas informasi publik terjaga dan konsisten.
3. Akuntabilitas yaitu meningkatkan akuntabilitas lembaga publik dalam pengelolaan informasi publik untuk membangun kepercayaan publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik, Setiap warga negara, baik itu individu maupun kelompok, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang dimiliki oleh lembaga publik. Informasi ini bisa berupa data, dokumen, atau segala bentuk informasi lainnya yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik.

Selanjutnya pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pasal 3 tentang Ruang Lingkup SPBE: Pasal ini secara umum menjelaskan bahwa SPBE mencakup tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit TIK, penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, dan pemantauan serta evaluasi SPBE.

Salah satu bentuk pembaharuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya meningkatkan kualitas dan akuntabilitas informasi publik di Sumatera Barat adalah dengan meluncurkan platform online Dashboard Pembangunan Sumatera Barat. Dashboard Pembangunan merupakan platform online yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memantau dan melakukan monitoring terhadap realisasi keuangan dan fisik pada APBD tahun berjalan, serta juga melihat dampak realisasi tersebut pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rendahnya kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baik dalam realisasi Pendapatan maupun dalam realisasi belanja Pembangunan, belum ada monitoring secara online dan realtime terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta minimnya keterlibatan Masyarakat untuk pemantauan kinerja pembangunan menjadi Latar belakang utama yang mendasari pembuatan inovasi ini.

B. IDENTIFIKASI ISU

Pengantar Metode Analisis

- A. USG (Urgency, Seriousness, Growth): Metode ini berfungsi sebagai alat prioritisasi untuk mengevaluasi seberapa mendesak suatu masalah harus ditangani, seberapa serius dampaknya jika tidak ditangani, dan seberapa cepat masalah tersebut dapat memburuk. Skala penilaian yang digunakan adalah 1 (rendah) hingga 5 (sangat tinggi) untuk setiap kriteria. Total skor USG yang lebih tinggi mengindikasikan prioritas penanganan yang lebih tinggi.
 - a. Urgency (U): Mengukur tingkat kedesaan isu yang didasarkan pada waktu, tekanan eksternal, atau tenggat waktu.
 - b. Seriousness (S): Mengevaluasi dampak dan konsekuensi yang mungkin terjadi jika isu tidak diselesaikan, baik terhadap kinerja organisasi, sumber daya, maupun reputasi.
 - c. Growth (G): Memprediksi potensi pertumbuhan atau eskalasi masalah jika tidak ada intervensi yang dilakukan.
- B. APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Layak): Metode ini digunakan untuk menyaring dan memvalidasi kelayakan suatu isu untuk dibahas secara mendalam.
 - a. Aktual: Mengindikasikan apakah isu tersebut sedang terjadi atau menjadi perhatian publik saat ini.
 - b. Problematik: Menentukan apakah isu tersebut mengandung masalah yang membutuhkan solusi dan bukan sekadar kondisi biasa.
 - c. Kekhalayakan: Mengukur seberapa luas isu tersebut berdampak pada masyarakat atau kelompok tertentu.
 - d. Layak: Menilai apakah isu tersebut realistis dan relevan untuk dibahas serta dapat dicarikan solusinya dalam kapasitas dan kewenangan instansi.

Isu 1: Belum Optimalnya Pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI sebagai Pengelola Persuratan Digital

Latar Belakang Isu: Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan inisiatif nasional yang digagas oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bersama Kementerian PANRB sebagai bagian integral dari kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan utama SRIKANDI adalah mentransformasi tata kelola persuratan dan kearsipan dari manual menjadi digital, demi mewujudkan efisiensi operasional, peningkatan akuntabilitas, dan integrasi data antarinstansi pemerintah. Pemanfaatan yang belum optimal di BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat mengindikasikan bahwa adopsi penuh dan fungsionalitas aplikasi ini belum tercapai, sehingga potensi manfaatnya belum terealisasi maksimal.

1.1 Analisis USG

1. Urgency (U): 5 (Sangat Mendesak)
 - a. Implementasi SRIKANDI merupakan amanat nasional dan menjadi salah satu indikator kunci dalam evaluasi kematangan SPBE. Setiap instansi pemerintah daerah diwajibkan untuk mengadopsi dan mengoptimalkan penggunaannya. Kegagalan adaptasi yang cepat dapat menghambat interoperabilitas data persuratan dengan kementerian/lembaga lain di tingkat pusat maupun daerah, berpotensi menurunkan nilai indeks SPBE Provinsi, serta menciptakan disparitas dalam kecepatan dan validitas informasi korespondensi pemerintah.
2. Seriousness (S): 5 (Sangat Serius)
 - a. Apabila pemanfaatan SRIKANDI tidak optimal, BAPPEDA akan tertinggal dalam agenda reformasi birokrasi digital. Proses persuratan internal dan eksternal akan tetap bergantung pada metode manual atau hibrida, yang secara inheren lebih lambat, rentan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan arsip fisik, sulit dilacak riwayatnya, serta memakan biaya operasional yang tinggi (pengadaan kertas, tinta, distribusi fisik). Kondisi ini secara langsung memengaruhi efisiensi kerja pegawai, transparansi tata kelola persuratan, dan kecepatan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini.
3. Growth (G): 4 (Cepat Memburuk)
 - a. Jika permasalahan dalam adopsi dan optimalisasi ini terus berlanjut tanpa intervensi proaktif, akumulasi surat-surat yang tidak terkelola secara digital akan semakin besar, mempersulit proses migrasi data arsip di masa mendatang. Ketergantungan pada metode kerja konvensional akan semakin mengakar kuat di kalangan pegawai, dan kesenjangan kompetensi digital antar generasi di lingkungan kerja dapat melebar, menimbulkan friksi dan menghambat inovasi.
4. Total USG: 14 (Prioritas Tinggi)

1.2 Analisis APKL

1. Aktual: Ya. Tantangan dalam adaptasi dan optimalisasi sistem informasi baru merupakan fenomena umum yang sedang terjadi di banyak instansi pemerintahan, termasuk BAPPEDA, khususnya pada fase transisi implementasi.
2. Problematik: Ya. Proses transisi dari sistem manual ke digitalisasi seringkali diwarnai oleh resistensi perubahan, kendala teknis, kebutuhan akan pelatihan yang efektif, dan adaptasi prosedur kerja yang memadai.
3. Kekhalayakan: Ya. Isu ini secara langsung memengaruhi seluruh pegawai BAPPEDA yang terlibat dalam siklus persuratan (mulai dari staf administrasi, pengelola surat, hingga pimpinan bidang dan kepala badan), serta pihak eksternal yang berkorespondensi dengan BAPPEDA. Efisiensi persuratan merupakan fondasi kecepatan pelayanan publik.

4. Layak: Ya. Permasalahan ini berada dalam lingkup kewenangan dan kapasitas BAPPEDA untuk diatasi melalui kebijakan internal, program pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Isu 2: Masih Kurangnya Diseminasi dan Komitmen Bersama Dalam Penggunaan Aplikasi SAKATO PLAN sebagai Pengelola Dana Hibah Sumatera Barat

Latar Belakang Isu: Aplikasi SAKATO PLAN (Sistem Aplikasi Konsolidasi Anggaran Terpadu Online) merupakan sistem informasi yang kemungkinan besar dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengelola siklus dana hibah secara terintegrasi, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi, persetujuan, pencairan, hingga pertanggung jawaban dan pelaporan. Isu utama di sini adalah diseminasi penggunaan, yang mengindikasikan bahwa meskipun aplikasi mungkin sudah ada, pemahaman, adopsi, dan pemanfaatannya oleh para pihak yang berkepentingan (terutama calon penerima hibah dan OPD terkait) belum optimal. Pengelolaan dana hibah yang transparan dan akuntabel sangat vital untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan alokasi dana yang tepat sasaran demi mendukung program pembangunan.

2.1 Analisis USG

- Urgency (U): 5 (Sangat Mendesak)
 - a. Pengelolaan dana hibah terikat langsung dengan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memiliki tenggat waktu yang ketat untuk setiap tahapan (perencanaan, pengajuan, pencairan, pelaporan). Keterlambatan atau kesalahan dalam penggunaan aplikasi SAKATO PLAN akan berdampak langsung pada penyerapan anggaran yang tidak optimal dan akuntabilitas keuangan daerah, serta dapat memicu masalah hukum jika terjadi penyimpangan. Tuntutan transparansi dari publik dan lembaga pengawas juga sangat tinggi.
- B. Seriousness (S): 5 (Sangat Serius)
 - a. Jika diseminasi dan penggunaan aplikasi SAKATO PLAN tidak optimal, dampaknya bisa sangat serius: potensi penyalahgunaan atau penyelewengan dana, inefisiensi alokasi anggaran, hambatan signifikan dalam pencairan dana yang mengakibatkan terhambatnya program pembangunan, penurunan drastis kepercayaan publik, temuan audit yang berulang, hingga potensi sanksi administratif atau implikasi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Permasalahan ini juga dapat menghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan yang didanai melalui hibah.
- C. Growth (G): 5 (Sangat Cepat Memburuk)
 - a. Apabila masalah dalam diseminasi dan penggunaan aplikasi SAKATO PLAN tidak ditangani secara proaktif dan komprehensif, permasalahan terkait pengelolaan dana hibah cenderung akan berlipat ganda setiap tahun anggaran. Akumulasi temuan audit, peningkatan keluhan dari masyarakat atau calon penerima hibah, dan kerugian finansial akibat

inefisiensi dapat merusak reputasi Pemerintah Provinsi secara berkelanjutan. Sistem yang tidak dibenahi secara fundamental akan terus menjadi sumber risiko keuangan dan hukum yang signifikan.

D. Total USG: 15 (Prioritas Utama dan Krusial)

2.2 Analisis APKL

- A. Aktual: Ya. Pengelolaan dana hibah merupakan agenda tahunan yang selalu menjadi fokus utama, dan tantangan dalam memastikan transparansi, efisiensi, serta aksesibilitas melalui sistem aplikasi seringkali muncul sebagai permasalahan aktual.
- B. Problematis: Ya. Manajemen dana hibah secara inheren kompleks karena melibatkan banyak pihak, regulasi yang dinamis, serta risiko penyimpangan. Diseminasi yang buruk terhadap aplikasi justru memperparah kompleksitas dan potensi masalah tersebut.
- C. Kekhalayakan: Ya. Isu ini berdampak luas pada berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait (BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat), ribuan calon penerima hibah (seperti organisasi kemasyarakatan, yayasan, dan kelompok masyarakat), serta seluruh masyarakat umum sebagai pembayar pajak yang memiliki hak untuk mengetahui penggunaan dananya secara transparan.
- D. Layak: Ya. Optimalisasi diseminasi dan penggunaan aplikasi SAKATO PLAN merupakan isu krusial yang berada dalam lingkup kewenangan dan kapasitas Pemerintah Provinsi untuk diperbaiki melalui kebijakan, sosialisasi masif, serta perbaikan sistem dan prosedur internal.

Isu 3: Pembaharuan Tampilan Web Dashboard Pembangunan Untuk Akuntabilitas Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Latar Belakang Isu: Optimalisasi Web Dashboard Pembangunan Terpadu merupakan proyek strategis yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan memvisualisasikan data-data kunci pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Dashboard ini diharapkan dapat menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari berbagai sektor, data opsen pajak secara real-time, serta gambaran kondisi keuangan daerah secara komprehensif. Tujuan utamanya adalah menyediakan satu sumber informasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses bagi para pengambil kebijakan di BAPPEDA dan OPD terkait, DPRD, serta masyarakat umum, untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berbasis data. Optimalisasi yang ditekankan di sini menunjukkan bahwa meskipun dashboard mungkin sudah ada atau sedang dalam pengembangan, potensi penuhnya belum tercapai.

3.1 Analisis USG

A. Urgency (U): 5 (Sangat Mendesak)

- a. Dalam era pemerintahan berbasis data, ketersediaan dashboard terpadu adalah kebutuhan fundamental untuk pengambilan keputusan strategis yang cepat dan tepat di tingkat provinsi. Keterlambatan dalam optimalisasi dashboard pembangunan ini akan menghambat kemampuan BAPPEDA dan pimpinan daerah dalam memantau IKU secara holistik, mengevaluasi kinerja keuangan secara real-time, dan merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kondisi aktual. Mandat SPBE dan Smart Province juga menuntut integrasi data yang komprehensif.

B. Seriousness (S): 5 (Sangat Serius)

- a. Jika dashboard pembangunan tidak optimal, dampaknya sangat serius dan luas: perencanaan pembangunan yang tidak didukung data yang akurat dan terintegrasi akan berpotensi suboptimal, alokasi anggaran tidak efisien, dan sulitnya melakukan evaluasi kinerja pemerintah secara objektif. Ini juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik akibat kurangnya transparansi data kinerja provinsi secara menyeluruh, serta menghambat upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan. Potensi penyimpangan data atau interpretasi yang salah juga bisa meningkat.

C. Growth (G): 5 (Sangat Cepat Memburuk)

- a. Apabila optimalisasi dashboard pembangunan tidak diprioritaskan, kesenjangan data antar sektor akan terus melebar, mempersulit integrasi di kemudian hari. Keputusan strategis provinsi akan semakin sulit berbasis data yang komprehensif, dan BAPPEDA akan kesulitan berperan sebagai "think tank" pembangunan yang mengandalkan bukti empiris. Tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi akan terus bergerak maju, sehingga ketertinggalan dalam penyediaan data terintegrasi akan semakin signifikan dan merusak reputasi Pemprov dalam transparansi dan smart governance.

D. Total USG: 15 (Prioritas Utama dan Kritis)

3.2 Analisis APKL

- Aktual: Ya. Pengembangan dan optimalisasi dashboard data terpadu merupakan pekerjaan berkelanjutan di banyak pemerintah daerah yang berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja. Isu ini relevan dengan agenda pembangunan saat ini.
- Problematik: Ya. Masalah umum terkait dashboard terpadu meliputi tantangan integrasi data dari berbagai sumber, akurasi data yang bervariasi, desain visualisasi yang efektif, serta ketersediaan data real-time dan up-to-date.
- Kekhalayakan: Ya. Isu ini berdampak pada sangat banyak pihak: seluruh pimpinan BAPPEDA dan OPD terkait, Badan Pendapatan Daerah, BPKAD, DPRD sebagai lembaga pengawas, akademisi, peneliti, investor, hingga seluruh

masyarakat umum yang berhak memantau kinerja dan keuangan pemerintah daerah.

- Layak: Ya. Optimalisasi dashboard pembangunan ini merupakan isu strategis yang sepenuhnya berada dalam lingkup kewenangan dan kapasitas BAPPEDA untuk diinisiasi dan dikoordinasikan dengan OPD terkait lainnya, karena terkait langsung dengan fungsi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

C. PERUMUSAN DAN PENETAPAN ISU

Berikut adalah rekapitulasi analisis USG dan APKL untuk ketiga isu tersebut, dengan penyesuaian prioritas untuk 3 Isu Tersebut :

Tabel 1. 1: Data USG (Urgency, Seriousness, Growth)

Isu	USG (U)	USG (S)	USG (G)	Total USG	Ranking
1. Pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI sebagai Pengelola Persuratan Digital	5	5	4	14	3
2. Diseminasi Penggunaan Aplikasi SAKATO PLAN sebagai Pengelola Dana Hibah Sumber	5	5	5	15	2
3. Pembaharuan Tampilan Web Dashboard Pembangunan Untuk Akuntabilitas Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	5	5	5	15	1

Tabel 1. 2: Data APKL (Aktual, Problematik, Kelayakan, Layak) dan Keterangan Prioritas

Isu	APKL (Aktual)	APKL (Problematik)	APKL (Kekhalayakan)	APKL (Layak)	Keterangan Prioritas	Ranking
1. Pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI sebagai Pengelola Persuratan Digital	Ya	Ya	Ya	Ya	Prioritas Tinggi	3
2. Diseminasi Penggunaan Aplikasi SAKATO PLAN sebagai Pengelola Dana Hibah Sumber	Ya	Ya	Ya	Ya	Prioritas Sangat Tinggi	2
3. Pembaharuan Tampilan Web Dashboard Pembangunan Untuk Akuntabilitas Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Ya	Ya	Ya	Ya	Prioritas Utama dan Kritis Strategis	1

Analisis Komparatif Prioritas

Berdasarkan hasil analisis USG dan APKL, ketiga isu yang diidentifikasi terbukti layak untuk dibahas dan dicarikan solusinya, sebagaimana divalidasi oleh kriteria APKL yang konsisten. Secara spesifik, evaluasi berdasarkan total skor USG mengindikasikan bahwa optimalisasi Web Dashboard Pembangunan Terpadu dan diseminasi penggunaan Aplikasi Sakato Plan memiliki total skor USG yang sama tinggi (15), menempatkan keduanya pada tingkat prioritas tertinggi.

Namun, dalam konteks BAPPEDA sebagai organ perencana pembangunan, optimalisasi Web Dashboard Pembangunan Terpadu dapat dianggap sebagai prioritas strategis yang paling krusial. Hal ini dikarenakan Dashboard Pembangunan memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan provinsi, Sakatoplan Bappeda, LPSE Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, Simbangda Biro Administrasi Pembangunan, Esakip Biro Organisasi, Data Analitik Diskominfo data opsen pajak, Bahkan kondisi keuangan secara makro melalui E-Pendapatan.



Gambar 1.1

Keberhasilan optimalisasi dashboard pembangunan akan secara fundamental mendukung fungsi inti BAPPEDA dalam:

- A. Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Menyediakan landasan data yang solid dan terintegrasi untuk perumusan kebijakan pembangunan yang efektif.
- B. Transparansi dan Akuntabilitas Menyeluruh: Meningkatkan transparansi kinerja dan keuangan pemerintah provinsi secara holistik kepada publik.
- C. Koordinasi Lintas Sektor: Menjadi alat pemersatu data dari berbagai OPD, memfasilitasi koordinasi antar instansi untuk mencapai target pembangunan bersama.

Meskipun diseminasi SAKATO PLAN sangat penting untuk akuntabilitas dana hibah, dampaknya lebih spesifik pada satu jenis pendanaan. Demikian pula dengan SRIKANDI yang fokus pada persuratan digital. Sementara itu, pembaharuan dashboard pembangunan merupakan fondasi infrastruktur data yang akan menopang seluruh aspek perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan provinsi secara makro dan strategis, menjadikannya isu prioritas yang memiliki dampak paling luas dan jangka panjang bagi visi pembangunan Sumatera Barat.

D. Rencana Kegiatan, Tahapan Kegiatan Dan Output Yang Diharapkan

Laporan aktualisasi ini telah mengikuti Pedoman Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Tujuan laporan aktualisasi ini di buat adalah untuk memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan penulis lakukan sehingga dapat mewujudkan gagasan aktualisasi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan setiap kegiatan dan tahapan kegiatan akan selalu berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar ASN BerAkhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Selanjutnya kegiatan tersebut juga akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi serta nilai organisasi.

Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Identifikasi Isu : Tampilan lama dari informasi Web Dashboard Pembangunan Sumatera Barat, Kurangnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam menopang informasi penting didalam Web Dashboard Pembangunan serta perlu pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Isu Yang Diangkat : Pembaharuan Tampilan Web Dashboard Pembangunan Terpadu untuk Akuntabilitas informasi publik di Provinsi Sumatera Barat

Gagasan Pemecahan Isu : Penyederhanaan dan Pembaharuan Tampilan Web Dashboard Pembangunan Menu yang Lebih Mudah Dipahami dan diakses semua kalangan tanpa username dan password.

Tabel 1.3 Rencana Kegiatan, Tahapan Kegiatan Dan Output Yang Diharapkan

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil/Output	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelaksanaan Konsultasi Gagasan dengan Mentor	Melaksanakan Konsultasi dengan mentor terkait laporan aktualisasi	Terciptanya persetujuan serta mendapatkan arahan dan saran terhadap laporan Aktualisasi	<p>Berorientasi Pelayanan: Berkonsultasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan dengan Mentor dengan sopan dan santun</p> <p>Akuntabel: Bertanggungjawab dengan Judul laporan Aktualisasi</p> <p>Kompeten: Mempersiapkan dengan baik materi yang akan dibahas bersama Mentor selama berkonsultasi</p> <p>Harmonis: Membangun Komunikasi positif antara pimpinan dan staf.</p> <p>Loyal: Melaksanakan apa</p>	Dengan adanya kegiatan pelaksanaan konsultasi aktualisasi akan berkontribusi terhadap misi organisasi yaitu penguatan tata kelola pemerintah yang baik, dimana hal ini menunjukkan perlu adanya koordinasi agar tercipta-	Mendorong budaya konsultatif dan sinergis dalam organisasi.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil/Output	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
				<p>yang menjadi perintah dan masukan dari Mentor</p> <p>Adaptif : Antusias dan proaktif dalam berkonsultasi dengan Mentor.</p> <p>Kolaboratif: Bekerjasama dengan atasan terkait laporan aktualisasi</p>	nya hasil yang baik.	
		Melakukan diskusi atas gagasan terhadap isu terpilih.	<p>Kompeten: Menerima segala masukan yang diberi mentor dan memperbaiki segera laporan aktualisasi</p> <p>Harmonis: Membangun Komunikasi positif antara pimpinan dan staf.</p> <p>Loyal: Melaksanakan apa</p>			

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil/Output	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
				yang menjadi perintah dan masukan dari Mentor Kolaboratif: Bekerjasama dengan atasan dalam diskusi		
2	Riset Referensi dan Materi terkait Dashboard Pembangunan Sumatera Barat	Melaksanakan pencarian materi dan bahan langsung kepada admin atau melalui web langsung Melaksanakan pencarian materi dengan konsultasi kepada bidang P2EPD	Mendapatkan Bahan dan Materi terkait.	Adaptif: Mencari materi menggunakan teknologi informasi Kompeten: Terus Belajar untuk meningkatkan kemampuan Kolaboratif: Mampu berkoordinasi antar pegawai dengan baik Harmonis: Membangun komunikasi yang baik.	Dengan kegiatan pencarian data dengan memanfaatkan teknologi dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.	Menjadikan pegawai Adaptif terhadap pekerjaan dan kompeten dalam melaksanakannya

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil/Output	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
3	Konsultasi dengan Bidang P2EPD Bappeda Provinsi Sumatera Barat.	Melaksanakan konsultasi dengan bidang P2EPD	Mengetahui cara pelaksanaan penginputan data kedalam web dashboard pembangunan.	<p>Harmonis : Mampu menjalin hubungan yang baik sesama ASN</p> <p>Kolaboratif: Berkoordinasi dengan pegawai lainnya untuk membuat proses bisnis</p>	Kualitas pelayanan serta koordinasi yang menjadi makin baik serta akuntabilitas informasi meningkat yang membuat tata pemerintahan menjadi lebih baik.	Meningkatnya sinergitas dan harmonis antara pegawai di organisasi dan orientasi pelayanan yang cepat.
		Mencatat informasi penting yang didapat pada pelaksanaan konsultasi		<p>Berorientasi Pelayanan: Cepat dan tanggap dalam melaksanakan tugas</p> <p>Akuntabel: Mencatat informasi yang didapat merupakan suatu sikap bertanggungjawab terhadap suatu data Yang diperoleh.</p>		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil/Output	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
4	Pembuatan Proses Penyederhanaan Tampilan Web Dashboard Pembangunan	Menyiapkan tools yang mendukung.	Telah Membuat Tampilan Web Dashboard Pembangunan Bappeda Sumatera Barat Lebih Interaktif dan Mudah Dipahami	Adaptif: Fleksibel dan mampu mengoperasikan aplikasi dan web dalam pekerjaan Kompeten: Melaksanakan pekerjaan dengan mengedepankan kualitas yang baik	Peningkatan kualitas pelayanan dan penguasaan terhadap teknologi informasi oleh pegawai menjadikan sumber daya manusia menjadi kompeten	Adaptasi terhadap perkembangan zaman dan menghasilkan pekerjaan yang lebih kompeten
		Melaksanakan Proses Perubahan		Adaptif : Mampu mengerti dan paham web dashboard pembangunan. Kompeten: Mengedepankan hasil yang baik dalam pembuatan penyederhanaan.		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil/Output	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
		Penyelesaian Proses Penyederhanaan		<p>Kompeten: Melaksanakan tugas dengan sangat baik dan profesional</p> <p>Akuntabel: Bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses perubahan tampilan.</p>		
5	Evaluasi Hasil Proses Penyederhanaan Tampilan Web Dashboard Pembangunan	Melaksanakan Diskusi bersama mentor	Memperbaiki proses bisnis yang ada sesuai dengan koreksi yang diberikan oleh mentor	<p>Akuntabel: Tanggung jawab telah dilakukan hingga penyelesaian proses.</p> <p>Kolaboratif: Mampu berkoordinasi dengan atasan dengan baik</p> <p>Harmonis: Membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan</p>	Akuntabilitas dalam pekerjaan menjadi hal yang diperlukan dan koordinasi serta harmonisasi antar pegawai meningkat yang	Mendorong akuntabilitas dalam bekerja serta kemampuan untuk berkoordinasi yang akan menghasilkan pekerjaan yang kompeten

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil/Output	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
		Tindak lanjut hasil diskusi dan koreksi dari mentor		Berorientasi Pelayanan: Cepat dan tanggap dalam menyelesaikan koreksi yang diberikan Kompeten: Melakukan pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan IKK dengan sangat baik	mendukung misi tata Kelola pemerintahan yang baik	

BAB II

A. PROFIL INSTANSI



Gambar 2.1 Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat

1. Visi Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah "Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, efektif dan akuntabel dalam kerangka reformasi birokrasi"

Misi Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah untuk:

- a. Mewujudkan perencanaan yang partisipatif.
- b. Mewujudkan perencanaan yang efektif.
- c. Mewujudkan perencanaan yang akuntabel.
- d. Melaksanakan reformasi birokrasi.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas dan fungsi dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas Pokok

Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah

- b. Fungsi

Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;

- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
- 5) pelaksanaan administrasi Badan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Unit Kerja

Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 4 Bagian dan 12 Sub Bagian;

- a. Bagian Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bidang Data Dan Informasi.
- b. Bidang P2EPD dan Pembangunan Manusia;
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Manusia
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- c. Bagian Ekonomi Dan Sumberdaya Alam;
 - 1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan;
 - 2) Sub Bidang Industri, Perdagangan Dan Investasi;
 - 3) Sub Bidang Pariwisata, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
- d. Bagian Infrastruktur Dan Kewilayahan;
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan Dan Perhubungan;
 - 2) Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya Dan Kewilayahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda didukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil. Adapun komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Bappeda Prov. Sumbar

No.	Pegawai	Jumlah
1	PNS	74
2	PPPK	1
Total		75

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2025

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Prov. Sumbar 76 orang yang terdiri dari 75 PNS dan 1 PPPK.

Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Bappeda Prov. Sumbar Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pegawai	Pria	Wanita	Jumlah
1	PNS	41	32	74
2	PPPK	1	-	1
	Total	42	32	75

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2025

Dari tabel 2.2 diketahui bahwa PNS di lingkungan Bappeda Prov.Sumbar didominasi oleh PNS pria dengan jumlah 47 orang sedangkan PNS wanita 29 orang.Untuk PPPK pria dengan jumlah 1 orang.

Tabel 2. 3 Komposisi PNS Bappeda Prov. Sumbar Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	16
2	III	49
3	II	9
	Total	74

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2025

Adapun tugas Subbagian Program Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pembangunan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur, dan memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Mempersiapkan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).
2. Mengerjakan kerangka regulasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, dan tugas-tugas Bappeda lainnya.
3. Koordinasi Rencana Strategis Menyiapkan bahan koordinasi untuk penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
4. Pelaksanaan Musrenbang Melakukan persiapan dan pelaksanaan Musrenbang, yang merupakan forum musyawarah antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

6. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bappeda Sumatera Barat

Bappeda Provinsi merupakan salah satu dari perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Tugas pokok Bappeda sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yaitu membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Bappeda Provinsi dipimpin oleh Kepala Bappeda dalam hal ini Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang diubah melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 8 Tahun 2018.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Kepala Bappeda, Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan;

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan; Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah; dan Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan; Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean government. Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, sekretariat dan setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang/Sekretariat/UPTB lingkup Bappeda.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh pegawai/staf Bappeda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya. Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan melalui rencana pembentukan UPTB merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan.

B. ROLE MODEL



Gambar 2.3 Penulis dengan Role Model Ibu Verrawati Darman, SE

Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, penulis menetapkan sosok role model, yaitu individu yang mampu menjalankan fungsi serta mencerminkan nilai-nilai ASN BerAKHLAK secara konsisten, serta memberikan dampak positif di lingkungan organisasi. Adapun sosok yang penulis tetapkan sebagai role model adalah Ibu Verawati Darman, SE yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat, sekaligus menjadi mentor dalam pelaksanaan aktualisasi penulis. Ibu Verawati Darman, SE merupakan ASN dengan pengalaman yang luas dalam bidang administrasi pemerintahan, serta dikenal sebagai pribadi yang memiliki loyalitas tinggi terhadap institusi. Hal tersebut tercermin dari dedikasi dan komitmen beliau dalam menjalankan tugas serta konsistensi dalam memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan organisasi. Nilai loyal terimplementasi dengan baik melalui pelaksanaan tugas yang dilandasi oleh tanggung jawab dan integritas tinggi.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerja, Ibu Verawati selalu mengutamakan prinsip perbaikan berkelanjutan serta berorientasi pada kepuasan para pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai berorientasi pelayanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja beliau. Selain itu, setiap tugas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, jujur, cermat, dan disiplin, tanpa pernah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dari hal tersebut, nilai akuntabel sangat jelas tercermin dalam keseharian beliau.

Sebagai CPNS, penulis mendapatkan banyak kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri melalui berbagai penugasan yang diberikan langsung oleh Ibu Verawati. Evaluasi dan umpan balik yang beliau sampaikan

menjadi bahan refleksi dan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas kerja. Dengan demikian, nilai kompeten telah direalisasikan secara nyata oleh beliau, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas pribadi, tetapi juga dalam membina pegawai di bawah koordinasinya. Selain itu, Ibu Verawati juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, terbuka, dan menjunjung tinggi sikap saling membantu antarsesama rekan kerja, yang merupakan wujud dari nilai harmonis. Beliau juga aktif mendorong inovasi, kreativitas, dan sikap proaktif dalam bekerja, serta menanamkan pentingnya bersikap adaptif terhadap perubahan sebagai upaya mempertahankan relevansi dan kinerja organisasi.

Sebagai salah satu pejabat struktural, Ibu Verawati juga menunjukkan implementasi nilai kolaboratif melalui sikap terbuka dalam bekerja sama dengan berbagai pihak, baik lintas bidang maupun lintas perangkat daerah. Beliau menyadari bahwa setiap unit kerja saling berkaitan dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan karakter dan nilai-nilai tersebut, Ibu Verawati Darman layak menjadi teladan dalam pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK.

BAB III

REALISASI AKTUALISASI

A. Realisasi dan Kegiatan Output

Realisasi kegiatan dan output merupakan bagian dari pelaksanaan rencana kegiatan yang dirinci dalam beberapa tahapan untuk mencapai output yang diinginkan sesuai dengan rancangan aktualisasi yang telah diseminarkan. Berikut merupakan hasil realisasi kegiatan aktualisasi selama menjalani tahap habituasi dengan judul aktualisasi “**Pembaharuan Tampilan Web Dashboard Pembangunan Untuk Akuntabilitas Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat**”.

Kegiatan 1	Pelaksanaan Konsultasi Gagasan dengan Mentor
Waktu Pelaksanaan	24 Juli s/d 5 Juli 2025
Bukti Fisik	Dokumentasi Kegiatan

Penjelasan Realisasi Tahapan Kegiatan

Saya telah melaksanakan konsultasi gagasan dengan mentor mengenai materi Manajemen ASN sebagai bagian dari agenda 3. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengukur profesionalitas saya sebagai seorang ASN, yang salah satunya terlihat dari kemampuan dalam pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tahap pertama yang saya lakukan adalah melaksanakan konsultasi dengan mentor. Kami mendiskusikan rancangan aktualisasi yang telah saya susun. Dalam diskusi ini, mentor memberikan arahan dan masukan penting terkait isu yang akan diangkat, sekaligus memastikan bahwa program yang saya rencanakan sejalan dengan tujuan instansi.

Setelah itu, saya meminta saran dan masukan dari rekan kerja. Diskusi ini dilakukan secara aktif untuk memastikan permasalahan yang saya pilih memang relevan dan berhubungan dengan kondisi di organisasi. Pendapat dari rekan kerja sangat penting untuk memperkaya sudut pandang saya.

Sebagai tahapan akhir, saya kembali berdiskusi dengan mentor untuk menetapkan gagasan yang akan diangkat. Setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, kami membahas kembali isu yang telah saya diskusikan dengan rekan kerja dan akhirnya menetapkan satu permasalahan utama yang akan dijadikan fokus dalam laporan aktualisasi. Selama seluruh proses ini, saya merasa mendapatkan perlakuan yang harmonis dari mentor dan rekan kerja. Kami juga menunjukkan sikap **kolaboratif** yang positif dalam membahas permasalahan yang akan saya angkat.

Kegiatan 2	Riset Referensi dan Materi terkait pembaharuan Web Dashboard Pembangunan
Waktu Pelaksanaan	1 s/d 11 Juli 2025
Bukti Fisik	File Materi dan Foto Kegiatan

Penjelasan Realisasi Tahapan Kegiatan

Penulis melaksanakan pencarian materi di internet agar mengetahui informasi-informasi terkait dengan Dashboard Pembangunan **(Adaptif)**. Penulis juga berkoordinasi dengan Bidang P2EPD secara langsung untuk mendapatkan bahan materi Dashboard pembangunan **(Kolaboratif)** dan nantinya akan dikumpulkan menjadi satu informasi yang akan digunakan dalam pembuatan proses perubahan **(Kompeten)**.

Adapun sistem yang berbeda-beda diintegrasikan pada Dashboard Pembangunan Sumatera Barat adalah :

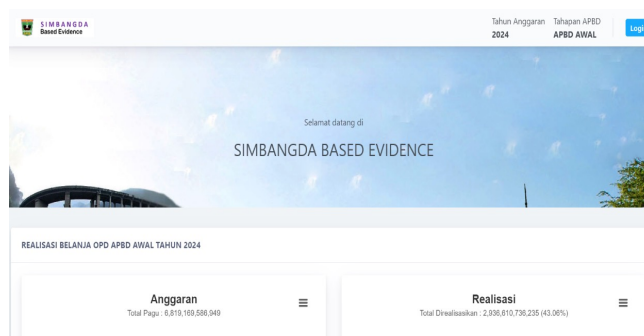
1. Pendapatan Daerah

Data pendapatan daerah ini didapat dari integrasi dengan aplikasi monitoring pendapatan yang sudah dibuat oleh Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat, aplikasi ini digunakan masih bersifat internal dilingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat di akses melalui : <http://182.253.192.83:8555/monitor>



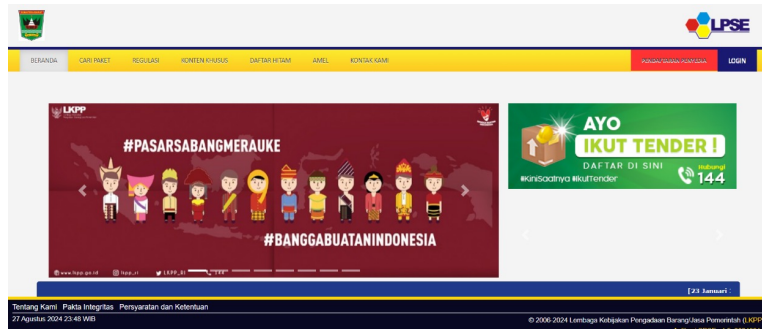
2. Realisasi Belanja Perangkat Daerah

Data Realisasi Belanja Perangkat Daerah diintegrasikan dengan aplikasi simbanda Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, adapun link aplikasi tersebut berada di simbanda.sumbarprov.go.id



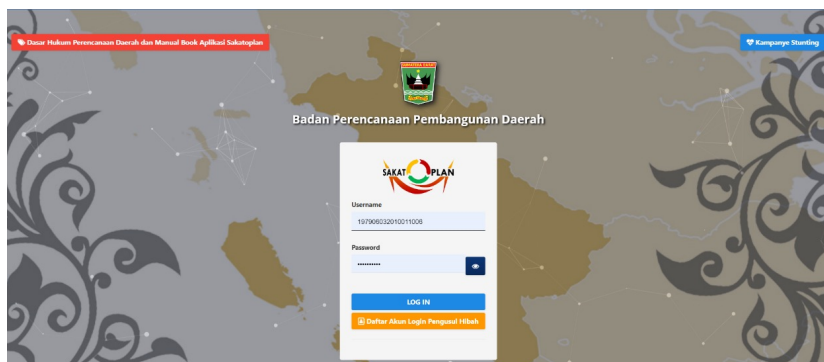
3. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Data ini merupakan pengintegrasian dari aplikasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE) Provinsi Sumatera Barat pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, link dari aplikasi ini adalah : <https://lpse.sumbarprov.go.id/eproc4>

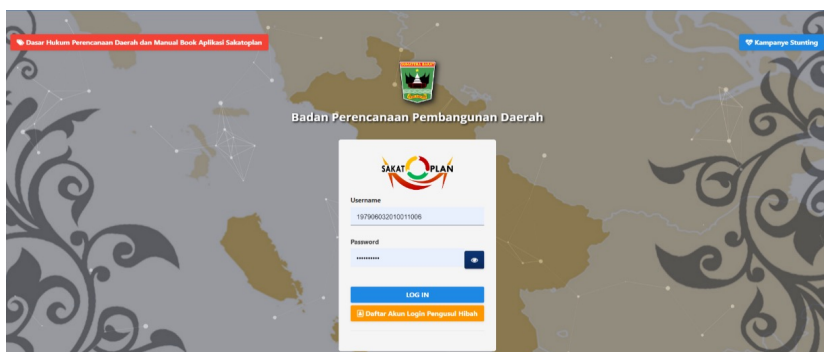


4. Hibah

Data hibah merupakan data yang di dapat dari integrasi Dashboard Pembangunan dengan aplikasi sakatoplan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, link dari aplikasi sakatoplan adalah <https://sakatoplan.sumbarprov.-go.id/>



5. Indikator Kinerja Utama dan Daerah Program Unggulan serta Indikator Program Indikator Kinerja Utama dan Daerah Program Unggulan serta Indikator Program integrasi Dashboard Pembangunan dengan aplikasi sakatoplan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.



6. Capaian Perjanjian Kinerja Ess II dan Perjanjian Kinerja Gubernur
Capaian Perjanjian Kinerja Ess II dan Perjanjian Kinerja Gubernur integrasi Dashboard Pembangunan dengan aplikasi e-sakip Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.



7. Dashboard analitik

Dashboard analitic merupakan link dari Dashboard Pembangunan untuk masuk ke aplikasi dashboard analitic yang di kembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat



Kegiatan 3	Konsultasi dengan Bidang P2EPD terkait Pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan
Waktu Pelaksanaan	7 s/d 18 Juli 2025
Bukti Fisik	Foto Kegiatan

Penjelasan Realisasi Tahapan Kegiatan

Kegiatan Pertama yaitu konsultasi dengan Bidang P2EPD terkait pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan. Pada tahapan ini penulis kembali berkoordinasi dengan bidang P2EPD serta bertanya tentang alur pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan.

Kegiatan Kedua yaitu belajar tentang cara pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan dengan pegawai organisasi. Penulis belajar kepada salah satu pegawai Bidang P2EPD yang biasanya membuat proses bisnis untuk beberapa kebijakan yang ada di sekretariat daerah. Penulis memahami alur apa saja yang akan dilakukan dalam pembuatan probis ini.

Kegiatan ketiga yaitu mencatat informasi penting yang didapat pada pelaksanaan konsultasi. Setelah penulis melaksanakan koordinasi dengan pegawai pada bidang P2EPD, penulis mencatat segala informasi yang telah didapat agar dapat menjadi referensi nantinya dalam melaksanakan pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan.

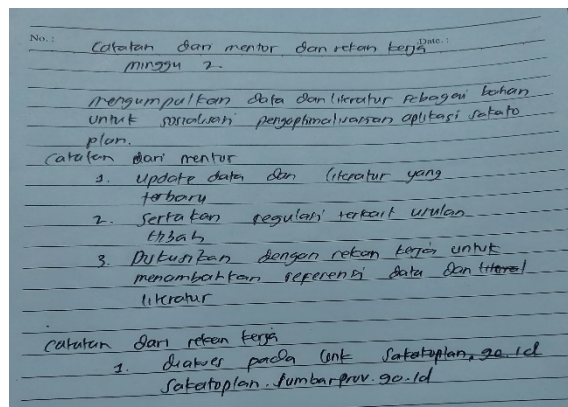
Pada kegiatan konsultasi ini, penulis mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan ini. Mulai dari berkoordinasi dengan pegawai Bidang P2EPD (**Kolaboratif**) dan dilayani dengan sepenuh hati Ketika bertanya seputar pembuatan IKK ini (**Berorientasi Pelayanan & Harmonis**) serta penulis yang mendapatkan serta mencatat informasi-informasi penting yang didapat pada konsultasi ini (**Kompeten**)



Konsultasi dengan Kepala Bidang P2EPD



pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan



Mencatat Informasi penting saat konsultasi

Kegiatan 4	Pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan Rekomendasi Penyusunan Kebijakan OPD
Waktu Pelaksanaan	7 s/d 25 Juli 2025
Bukti Fisik	Foto Kegiatan dan Screenshot
Penjelasan Realisasi Tahapan Kegiatan	
<p>Kegiatan pertama yaitu menyiapkan tools yang mendukung dalam proses pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan. Disini ada beberapa pilihan aplikasi dan platform digital, Kegiatan Kedua yaitu melaksanakan pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan. Tahapan ini penulis melakukan pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan sesuai dengan arahan dan bimbingan yang telah didapatkan sebelumnya pada bidang P2EPD.</p> <p>Kegiatan Ketiga adalah penyelesaian proses pembaharuan sehingga dapat lebih mudah untuk digunakan. Tahapan kegiatan ini adalah akhir dari rangkaian pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan yang dilakukan oleh penulis. Penulis mengedit kembali yang telah dibuat sebelum dilaporkan hasilnya kepada mentor dibantu oleh tim IT Bappeda.</p> <p>Pada kegiatan ini penulis memiliki pengetahuan baru tentang cara pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan dengan belajar kepada pegawai lainnya (Kompeten).</p>	

Sebagai ASN kita harus pandai dalam menggunakan teknologi (**Adaptif**).



Menyiapkan untuk pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan



Melaksanakan pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan

Kegiatan 5	Evaluasi Hasil pembaharuan dengan mentor dan Penyelesaian laporan aktualisasi
Waktu Pelaksanaan	28 Juli s/d 2 Agustus 2025
Bukti Fisik	Foto serta Video kegiatan, Hasil Pembaharuan dan Laporan Aktualisasi
Link video	https://drive.google.com/file/d/1TY18dNVw9jk9CquJDjB0VkJE-7I_VYg/view?usp=sharing

Penjelasan Realisasi Tahapan Kegiatan

Kegiatan pertama yaitu melaksanakan diskusi bersama mentor. Pada Tahapan diskusi, penulis meminta arahan kembali kepada mentor terkait proses pembaharuan yang telah dibuat. Arahan dan koreksi dari mentor nantinya akan diperbaiki kembali hingga proses pembaharuan tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan.

Kegiatan kedua yaitu tindak lanjut hasil diskusi dan koreksi dari mentor. Tahapan ini penulis melakukan perbaikan terhadap proses pembaharuan yang telah dibuat sesuai dengan

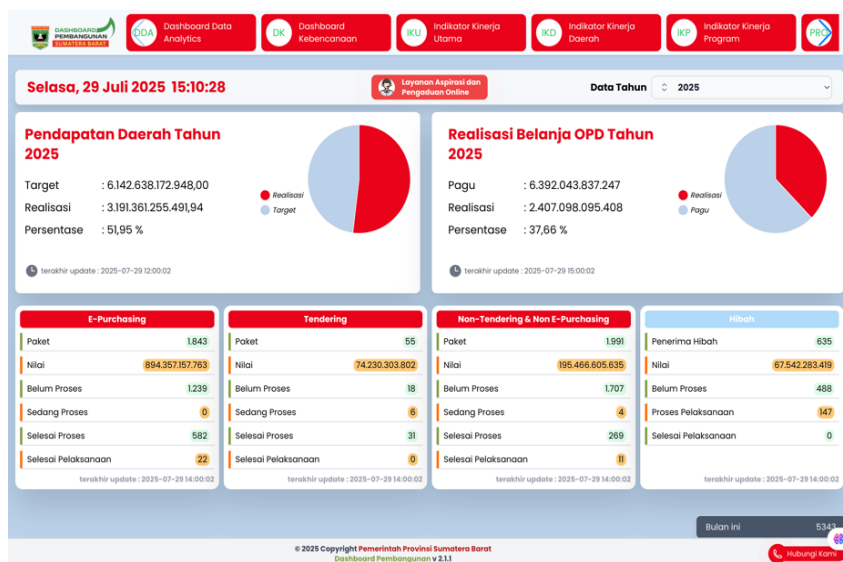
arahan dan masukan dari mentor. Setelah nantinya diperbaiki, maka akan dilaporkan kembali kepada mentor dan mendapatkan persetujuan dari mentor bahwa proses pembaharuan tersebut sudah selesai dibuat.

Kegiatan Ketiga yaitu menyelesaikan laporan aktualisasi. Setelah semua tahapan kegiatan telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyelesaikan laporan aktualisasi sebagai laporan dari kegiatan yang telah dilakukan oleh penulis. Laporan ini nantinya akan digunakan untuk syarat penyelesaian Latihan Dasar CPNS Golongan III pada BPSDM Provinsi Sumatera Barat.

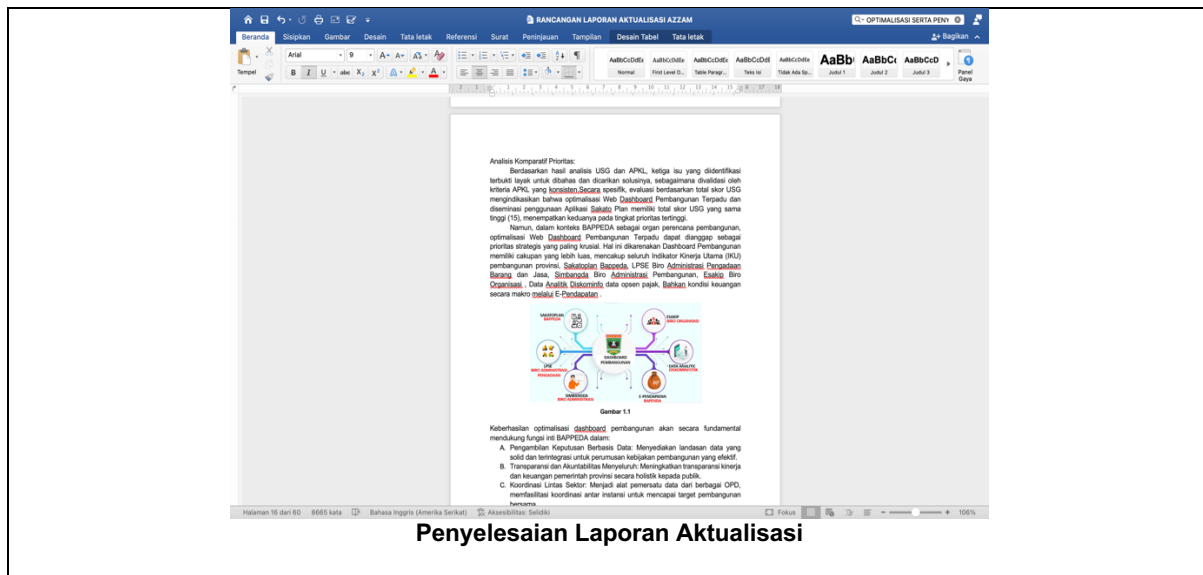
Diskusi dan arahan terkait proses bisnis yang telah dibuat



Tampilan lama Web Dashboard Pembangunan



Tampilan Baru Web Dashboard Pembangunan



Penyelesaian Laporan Aktualisasi

B. Faktor Pendukung Realisasi Aktualisasi

Ada beberapa faktor pendukung realisasi aktualisasi yang penulis

1. Dukungan Atasan Langsung

Penulis mendapatkan arahan dan bimbingan dari Kepala Bidang P2EPD dan Ibu sekretaris Bappeda sebagai mentor dan atasan langsung penulis. Mentor memberikan segala masukan-masukan mulai dari rancangan aktualisasi yang dibuat hingga nantinya membantu penulis dalam realisasi aktualisasi. Mentor memberikan bantuan teknis ataupun administrasi yang mendukung untuk keberhasilan aktualisasi.

2. Lingkungan Kerja yang Kondusif

Budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi dan perubahan memudahkan dalam realisasi aktualisasi. Komunikasi yang baik antarpegawai juga mendukung kolaborasi. Penulis mendapatkan respon yang sangat baik saat berkoordinasi terkait pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan yang dilakukan.

3. Pemahaman yang jelas atas masalah dan isu

Pemahaman yang baik terhadap isu aktualisasi membuat solusi yang dibuat lebih tepat sasaran. Hal ini sangat diperlukan dalam realisasi aktualisasi, dikarenakan output dari realisasi tersebut menjadi solusi yang di perlukan dan akan diimplementasikan sesuai dengan tujuan aktualisasi tersebut.

C. Faktor Penghambat Realisasi Aktualisasi

1. Terlalu Banyak Pilihan

Saat dihadapkan pada topik yang luas, otak cenderung kewalahan dengan banyaknya kemungkinan. Kita bisa terjebak dalam lingkaran "bagaimana jika" dan "mana yang paling baik", yang pada akhirnya membuat tidak memulai sama sekali. Kita terlalu memikirkan kesempurnaan ide awal, padahal ide yang bagus sering kali lahir dari pengembangan ide sederhana, karena munculnya banyak ide saya jadi kesulitan dalam memilih ide web dashboard pembangunan.

2. Informasi Data yang sedikit sulit

Beberapa data yang diperlukan agak sulit diperoleh dikarenakan beberapa pegawai sangat sibuk dengan pekerjaan dan tugas masing-masing. Dengan waktu yang sedikit lama, penulis akhirnya mendapatkan data-data yang diperlukan untuk keperluan laporan aktualisasi.

D. Analisa Dampak

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Dampak tidak diterapkan nilai-nilai BERAKHLAK
1	Pelaksanaan Konsultasi Gagasan dengan Mentor	Melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi	Harmonis. Berbahasa yang sopan dan santun kepada mentor, agar tidak menyinggung perasaan. Loyal. Melaksanakan perintah dan arahan mentor, jika tidak dilakukan akan dianggap tidak loyal dan bertindak seenaknya. Kolaboratif. Bekerjasama dengan mentor, jika tidak dilaksanakan maka tidak akan dapat arahan dan bimbingan dari mentor saat aktualisasi.

		<p>Meminta saran dan masukan dengan pihak terkait dan rekan kerja</p>	<p>Harmonis. Menghargai perbedaan pendapat, jika tidak dilaksanakan maka akan menjadi suatu perselisihan dalam mengemukakan pendapat</p> <p>Kompeten. Memahami masukan dari rekan kerja, jika tidak dilaksanakan maka apa yang telah disampaikan oleh rekan kerja akan dianggap sepele dan tidak dijadikan sebagai masukan yang membangun untuk penulis</p>
		<p>Melakukan diskusi atas gagasan terhadap isu terpilih</p>	<p>Berorientasi Pelayanan : Menerima segala bentuk arahan dan bimbingan dari mentor, jika tidak diterapkan akan menyalahi kode etik berorientasi pelayanan yaitu melakukan perbaikan tiada henti</p> <p>Harmonis. Harus membangun komunikasi yang baik, jika tidak maka menyampaikan ide tanpa interupsi, hal ini dapat menyebabkan terhambatnya proses komunikasi, hilangnya ide-ide berharga, dan menurunnya semangat partisipasi dalam tim.</p> <p>Kolaboratif. Mampu berkoordinasi dengan baik, apabila tidak mampu berkoordinasi maka akan terjadi miskomunikasi dengan rekan kerja terhadap isu permasalahan yang dibahas</p>

2	Riset Referensi Materi terkait Web Dashboard Pembangunan	Melaksanakan pencarian materi di internet di web Bappeda	<p>Adaptif. Mencari materi menggunakan teknologi informasi. Kita harus melek terhadap perkembangan teknologi, jika tidak kita akan tertinggal terhadap perkembangan zaman.</p> <p>Kompeten. Terus belajar meningkatkan kemampuan, dimanapun kapanpun. Jika tidak penulis akan tertinggal dari segi pengetahuan karena itu adalah aset yang penting bagi pegawai.</p>
		Melaksanakan pencarian materi dengan konsultasi kepada Bidang P2EPD	<p>Kolaboratif. Mampu berkoordinasi dengan pegawai bagian lain, karena ASN itu sifatnya harus bekerjasama mencapai tujuan, jika tidak dilakukan maka tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan</p> <p>Harmonis. Membangun komunikasi yang baik sesama pegawai, jika tidak mampu maka sebagai ASN akan kesulitan dalam bekerja karena ASN bekerja sering berkoordinasi dan saling berkomunikasi</p>
		Mengumpulkan materi yang sudah didapatkan	<p>Berorientasi Pelayanan. Dengan tepat mengumpulkan informasi penting, apabila tidak dikumpulkan maka informasi yang didapatkan tidak dapat digunakan</p> <p>Kompeten. Menggunakan informasi yang didapat sebaik-baiknya, jika tidak diterapkan maka membuat informasi itu menjadi sesuatu informasi yang penting.</p>

3	Konsultasi dengan Bidang P2EPD terkait Pembaharuan Tampilan	Melaksanakan konsultasi dengan Kepala Bidang P2EPD	<p>Harmonis. Mampu menjalin hubungan yang baik, jika tidak diterapkan hubungan baik antarpegawai akan terganggu</p> <p>Kolaboratif. Berkoordinasi dengan pegawai lainnya untuk membuat proses bisnis, jika tidak dilaksanakan maka proses bisnis yang akan dibuat tentunya tidak sesuai dengan aturan yang ada karena proses bisnis adalah bagian pekerjaan dari Bidang P2EPD</p>
		Belajar tentang cara Pembaharuan Tampilan	<p>Kompeten. Menambah ilmu dan keterampilan baru, apabila tidak dilaksanakan maka proses bisnis yang akan dibuat tidak akan dipahami cara pembuatannya</p> <p>Harmonis. Mampu bekerjasama dengan baik, apabila tidak dilaksanakan maka akan membuat hubungan sesama pegawai akan tidak baik.</p> <p>Kolaboratif. Membangun Kerjasama lintas bagian dan berkoordinasi, apabila tidak diterapkan maka pekerjaan yang dilakukan tidak akan terselesaikan</p>
		Mencatat informasi penting yang didapat pada pelaksanaan konsultasi	<p>Berorientasi Pelayanan. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan tugas, jika tidak diterapkan maka informasi yang didapat akan sia-sia</p> <p>Akuntabel. Mencatat informasi sesuai dengan informasi yang didapat, jika tidak diterapkan maka akan terjadi pemalsuan</p>

			<p>informasi yang digunakan</p> <p>Kompeten. Selalu mengembangkan diri dengan informasi terbaru, apabila tidak diterapkan tentunya tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang penting bagi diri.</p>
4	Pembaharuan Tampilan Web Dashboard Pembangunan	Menyiapkan proses perubahan Tampilan Web Dashboard Pembangunan	<p>Adaptif. Fleksibel dan mampu mengoperasikan aplikasi, jika tidak dapat melakukannya maka akan tertinggal dengan perkembangan zaman dan tidak berkompotensi sebagai ASN</p> <p>Kompeten. Melaksanakan pekerjaan dengan mengedepankan kualitas yang baik, apabila tidak diterapkan maka setiap pekerjaan yang dilakukan akan dibuat seadanya tanpa mementingkan kualitas pekerjaan.</p>
		Melaksanakan proses pembaharuan Tampilan	<p>Adaptif. Mampu menggunakan teknologi dalam menggunakan proses bisnis, jika tidak akan terganggu dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari karena kita saat ini sangat bergantung dengan teknologi.</p> <p>Kompeten. Mengedepankan hasil Pembaharuan Tampilan yang baik, apabila tidak diterapkan maka proses bisnis yang dibuat tidak dapat digunakan karena dibuat seadanya dan tergolong asal-asalan.</p>

		Penyelesaian proses pembaharuan tampilan	<p>Kompeten. Melaksanakan tugas dengan sangat baik dan profesional, apabila tidak diterapkan maka kualitas sebagai ASN hanya sebatas bekerja saja tidak mementingkan bekerja secara profesional dan baik.</p>
5	Foto kegiatan, Hasil pembaharuan tampilan dan Laporan Aktualisasi	Melaksanakan diskusi bersama mentor	<p>Akuntabel. Tanggung jawab dalam menyelesaikan proses bisnis, jika tidak dilaksanakan maka proses bisnis yang dibuat tidak akan selesai hingga waktu aktualisasi dilaksanakan.</p> <p>Kolaboratif. Mampu berkoordinasi dengan atasan yang baik, apabila tidak diterapkan maka proses bisnis yang telah dibuat belum sebenarnya selesai dan baik, dan diperlukan adanya koreksi agar menyempurnakan hasil yang dibuat.</p> <p>Harmonis. Membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan, sebagai peserta yang dibimbing maka penulis membutuhkan arahan dari mentor, apabila penulis tidak dapat berkomunikasi dengan baik kepada mentor maka hal tersebut menunjukkan kurangnya rasa hormat kepada mentor</p>
		Tindak lanjut hasil diskusi dan koreksi dari mentor	<p>Berorientasi Pelayanan. Cepat dan tanggap dalam menyelesaikan koreksi yang diberikan mentor, apabila koreksi yang diberikan tidak dilaksanakan perbaikan maka penulis lalai dalam melaksanakannya.</p>

			<p>Kompeten. Melakukan Pembaharuan Tampilandengan baik, apabila tidak dilaksanakan maka proses bisnis yang dibuat tersebut tidak memiliki kualitas untuk digunakan dalam kepentingan selanjutnya.</p>
		Menyelesaikan laporan aktualisasi	<p>Akuntabel. Membuat hasil laporan sesuai dengan realita kegiatan yang dilaksanakan, apabila hal ini tidak diterapkan maka penulis akan membuat laporan sesuka hati tanpa peduli dengan data-data yang penting dan sesuai dengan fakta dilapangan untuk dilaporkan</p> <p>Loyal. Melaporkan hasil laporan aktualisasi yang telah dibuat, hal ini sebagai bentuk loyalitas penulis kepada mentor dan menunjukkan rasa hormat dan terima kasih kepada mentor dalam bimbingan selama aktualisasi. Jika tidak dilaksanakan hal tersebut akan menyinggung mentor karena tidak ada laporan sedikitpun dari penulis yang telah dibimbing oleh mentor tersebut.</p>

E. Jadwal Realisasi Aktualisasi

NO	KEGIATAN	Realisasi Pelaksanaan Aktualisasi					
		Juni (Minggu Ke-4)	Juli				Agustus (Minggu Ke-1)
		IV	I	II	III	IV	I
1	Pelaksanaan Konsultasi Gagasan dengan Mentor	23-27 juni					
2	Riset Referensi dan Materi terkait web dashboard pembangunan		1-4 juli				
3	Konsultasi dengan Bidang P2EPD terkait Pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan			7-12 juli			
4	Pembaharuan tampilan web dashboard pembangunan			13-29 juli			
5	Evaluasi Hasil Proses Bisnis dengan mentor dan Penyelesaian laporan aktualisasi					30 juli - 4 agustus	

BAB IV

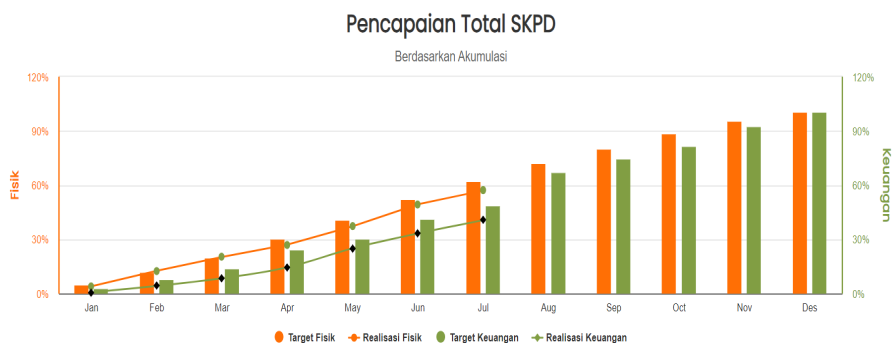
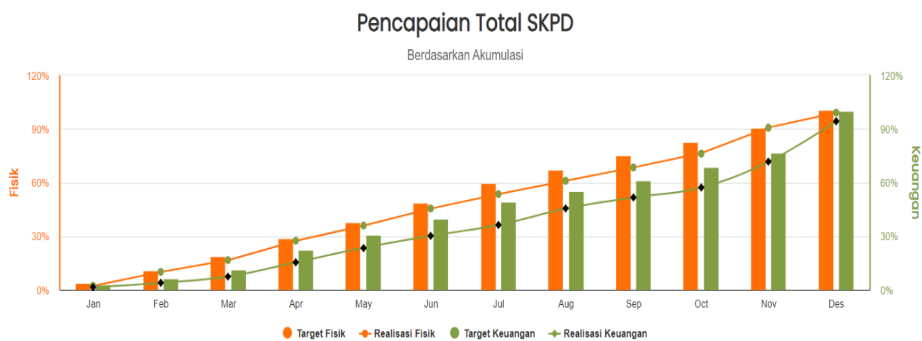
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Aktualisasi mengandung nilai-nilai dasar Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK), serta nilai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Kegiatan yang dilakukan oleh penulis ini dirasa telah mampu memberikan perubahan dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja dan Meningkatkan Koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah dengan Bidang P2EPD melalui pemanfaatan proses bisnis rekomendasi kebijakan OPD, sehingga proses bisnis dari rekomendasi kebijakan yang diusulkan oleh OPD menjadi suatu kebijakan yang nantinya dapat diukur menggunakan Web Dashboard Pembangunan dan menjadikan kebijakan tersebut suatu kebijakan yang bernilai dan berkualitas.

Dampak terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Dalam hal capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, aplikasi Dashboard Pembangunan ini secara tidak langsung mendonkrak kinerja Pemerintah Provinsi.



Dengan adanya Dashboard Pembangunan Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu bentuk konkret keterbukaan informasi Provinsi Sumatera Barat kepada publik, dengan tersedianya data yang informatif dan mudah diakses yang dapat menjadi sumber informasi yang valuable bagi masyarakat, media massa, akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk bersama-sama memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu Dashboard Pembangunan merupakan platform online yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memantau dan melakukan monitoring terhadap realisasi keuangan dan fisik pada APBD tahun berjalan, serta juga melihat dampak realisasi tersebut pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Secara garis besar manfaat dari Dashboard Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Saran

Adapun Saran dan masukan ke depan untuk Dashboard Pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah :

a) Peningkatan Fitur dan Fungsionalitas

Peningkatan fitur dan fungsionalitas kedepan berupa integrasi dengan data spasial: Memperkaya visualisasi data dengan peta interaktif yang lebih detail, sehingga pengguna dapat melihat distribusi data secara spasial.

b) Fitur kolaborasi

Dashboard Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini berintegrasi dengan lebih banyak aplikasi-aplikasi yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi jembatan dalam penyajian data yang komprehensif dan up-to-date.

c) Sumber data yang lebih beragam:

Memperluas sumber data yang ditampilkan tidak hanya dari Provinsi tetapi juga dari Kabupaten Kota, maka kedepan disarankan agar Dashboard Pembangunan ini juga menyajikan data capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten/ Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran

B. Modul

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2022. Panduan Teknik Penulisan Rancangan Aktualisasi dan Laporan Aktualisasi Tahun 2025. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. "Berorientasi Pelayanan" Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. "Akuntabel" Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. "Kompeten" Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. "Harmonis" Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. "Loyal" Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. “Adaptif” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. “Kolaboratif” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Buku Panduan Aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara

LAMPIRAN 1

TINDAK LANJUT HASIL AKTUALISASI

Komitmen Dalam Menerapkan Sikap Perilaku Bela Negara, Nilai-Nilai Dasar PNS dan Kedudukan dan Peran Pegawai Negeri Sipil untuk terwujudnya Smart Governance di Lingkungan Kerja

Saya yang menyatakan dibawah ini :

Nama : Abdurrahman Azzam, S.Tr.IP

NIP : 200110232024091002

Jabatan : Fasilitator Pemerintahan

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Menyatakan berkomitmen dalam penerapan sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil untuk terwujudnya Smart Governance di Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Menerapkan perilaku yang mencerminkan sikap bela negara di OPD seperti:
 - a. Ikut melaksanakan upacara kenegaraan
 - b. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial pada lingkungan kerja
 - c. Menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
2. Menerapkan perilaku yang mencerminkan nilai BerAkhlaq dalam kegiatan kantor seperti:
 - a. Berorientasi Pelayanan
 - Memberikan penjelasan yang sopan dan detail kepada setiap orang yang datang berkoordinasi ke Bagian Pemerintahan
 - Memberikan pelayanan yang responsif apabila terdapat permintaan informasi
 - b. Akuntabel
 - Menyusun laporan pemerintahan sesuai dengan data dan fakta yang ada
 - Menyimpan arsip dokumen penting secara sistematis dan dapat diakses saat diperlukan untuk audit
 - c. Kompeten
 - Menguasai teknik penulisan tata naskah dinas dan notulen yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN 1

MATRIKS PELAKSANAAN HABITUASI

NILAI DASAR	INDIKATOR NILAI	KEGIATAN 1			KEGIATAN 2			KEGIATAN 3			KEGIATAN 4			KEGIATAN 5			TOTAL
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
Berorientasi Pelayanan	Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat																0
	Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan						■			■							2
	Melakukan perbaikan tiada henti			■											■		2
Akuntabel	Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi									■			■	■		■	4
	Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien																0
	Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan																0
Kompeten	Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah		■		■				■	■							4
	Membantu orang lain belajar																0
	Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik						■					■	■	■		■	5

LAMPIRAN 2

KETERKAITAN DENGAN KEDUDUKAN DAN PERAN ASN	KEGIATAN					TOTAL
	1	2	3	4	5	
Manajemen ASN						3
Smart ASN						2

LAMPIRAN 3

KETERKAITAN TERHADAP VISI MISI DAN TATA NILAI ORGANISASI		KEGIATAN					TOTAL
		1	2	3	4	5	
VISI	<i>“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, efektif dan akuntabel dalam kerangka reformasi birokrasi”</i>						5
MISI	Mewujudkan perencanaan yang partisipatif, efektif, akuntabel.						1
	Melaksanakan reformasi birokrasi.						4
TATA NILAI	Mendorong peningkatan Harmonis dan Kolaboratif dalam Organisasi						3
	keahlian pegawai dalam penggunaan teknologi dan meningkatkan kompetensi serta kualitas pekerjaan						2

LAMPIRAN 4

KETERKAITAN DENGAN KEDUDUKAN DAN PERAN ASN	KEGIATAN					TOTAL
	1	2	3	4	5	
Manajemen ASN						3
Smart ASN						2

LAMPIRAN 5

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama : Abdurrahman Azzam, S.Tr.IP
NIP : 200110232024091002
Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Jabatan : Fasilitator Pemerintahan
Isu : Web Dashboard Pembangunan
Gagasan : Penyederhanaan dan Pembaharuan Tampilan sehingga menjadi *web user friendly*

Kegiatan 1

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan; Output Kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi;		

Kegiatan 2

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan; Output Kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Penguatan Nilai		

Organisasi;		
-------------	--	--

Kegiatan 3

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan; Output Kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi;		

Kegiatan 4

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan; Output Kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi;		

Kegiatan 5

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan; Output Kegiatan terhadap pemecahan		

isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi;		
--	--	--

LAMPIRAN 6**KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR**

Nama : Abdurrahman Azzam, S.Tr.IP
NIP : 200110232024091002
Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Jabatan : Fasilitator Pemerintahan
Isu : Web Dashboard Pembangunan
Gagasan : Penyederhanaan dan Pembaharuan Tampilan sehingga menjadi *web user friendly*

Kegiatan 1

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan; Output Kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi;		

Kegiatan 2

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan; Output Kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap		

Visi-Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi;		
---	--	--

Kegiatan 3

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan; Output Kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi;		

Kegiatan 4

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan; Output Kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi;		

Kegiatan 5

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan;		

Output Kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi;		
--	--	--